

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Menurut Borden dan Abbot dalam Manzilati (2017) tinjauan pustaka merupakan suatu proses meletakkan, mendapatkan, membaca, dan mengevaluasi literatur penelitian yang berkaitan dengan ketertarikan dari peneliti. Oleh karena itu dalam membahas masalah analisis usaha kecil dan menengah terhadap produk domestik regional bruto se-Priangan Timur, maka ada beberapa teori yang relevan terhadap pembahasan tersebut di antaranya:

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

2.1.1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Arsyad dalam Ahmad (2014) PDRB adalah jumlah nilai tambah yang ditimbulkan berbagai sektor atau lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di suatu daerah (regional). PDRB merupakan jumlah nilai *output* bersih perekonomian yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu (satu tahun). Menurut Badan Pusat Statistik PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. Beberapa pendekatan untuk menghitung PDRB yaitu:

a. Pendekatan produksi

PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit usaha kegiatan ekonomi di suatu daerah/wilayah tertentu. Unit-unit ekonomi tersebut dikelompokkan menjadi sembilan lapangan

usaha/sektor, yaitu; (1) Pertanian, (2) Pertambangan dan penggalian, (3) Industri Pengolahan, (4) Listrik, Gas dan Air Bersih, (5) Hotel dan Restoran, (7) Pengangkutan dan Komunikasi, (8) Keuangan, *Real Estate*, dan Jasa Perusahaan, (9) Jasa-jasa.

Pendekatan ini menekankan pada kegiatan yang menciptakan nilai tambah (*value added*). Maka dari itu, perhitungan hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada sektor produksi. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Y = (Q_1 \times P_1) + (Q_2 \times P_2) + (Q_3 \times P_3) + \dots + (Q_n \times P_n)$$

Keterangan:

Y = Pendapatan nasional

P₁ = Harga barang ke-1

P_n = Harga barang ke-n

Q₁ = Jenis barang ke-1

Q_n = Jenis barang ke-n

b. Pendekatan pengeluaran

PDRB merupakan jumlah seluruh komponen permintaan akhir suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Komponen tersebut meliputi pengeluaran rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan infrastruktur, dan ekspor neto. Melalui pendekatan ini pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan

permintaan akhir dari para pelaku ekonomi (konsumen, produsen, dan pemerintah) dalam suatu negara meliputi:

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga (*Consumption/C*).
2. Investasi domestik bruto (*Investment/I*).
3. Pengeluaran konsumsi pemerintah (*Government Expenditure/G*).
4. Ekspor neto atau nilai ekspor (*Export/X*) dikurangi impor (*Import/I*) → $(X-M)$.

Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = C + G + I + (X-M)$$

Keterangan:

Y = Pendapatan nasional

C = *Consumption* (konsumsi rumah tangga)

I = *Investment* (investasi)

G = *Government expenditure* (pengeluaran pemerintah)

X = Ekspor

M = Impor

c. Pendekatan pendapatan

PDRB merupakan jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta pada proses produksi suatu daerah/wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun) misalnya upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. PDRB mencakup penyusutan barang modal tetap dan pajak tak langsung. Berdasarkan pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima

masyarakat (pemilik faktor produksi) sebagai balas jasa yang mereka terima dalam proses produksi meliputi:

1. Upah/gaji (w) = Balas jasa pemilik tenaga kerja
2. Sewa (r) = Balas jasa pemilik tanah
3. Bunga (i) = Balas jasa pemilik modal
4. Keuntungan (profit/ p) = Balas jasa pengusaha

Secara matematis menurut pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = w + r + i + p$$

Keterangan:

Y = Pendapatan nasional

r = Pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya

w = Pendapatan bersih dari sewa

i = Pendapatan dari bunga

p = Pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan

Pembagian PDRB berdasarkan sektor unit-unit ekonomi di suatu wilayah atau daerah tertentu, dimana unit-unit ekonomi itu dikelompokkan dalam sektor atau sub sektor ekonomi (lapangan usaha). Pengelompokan sektoral ekonomi itu bisa menjadi tiga sektor, sembilan sektor, atau tujuh belas sektor tergantung konsep sektoral ekonomi yang digunakan atau berlaku di masing-masing negara/daerah maupun dalam skala internasional. Sebagai contoh PDRB dengan penyajian sembilan unit produksi atau sembilan lapangan usaha meliputi:

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan;
2. Pertambangan dan Penggalian;
3. Industri Pengolahan;
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih;
5. Konstruksi;
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran;
7. Pengangkutan dan Komunikasi;
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan;
9. Jasa-jasa termasuk Jasa Pelayanan Pemerintah.

2.1.2 Jumlah UMKM

2.1.2.1 Pengertian UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyebutkan bahwa UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha yang merupakan bukan anak perusahaan atau anak cabang yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tersebut. Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil, atau usaha besar yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tersebut.

Kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah nilai kekayaan bersih atau aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak 50 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar 300 juta rupiah.
2. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah.
3. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah hingga paling banyak 100 miliar rupiah, serta hasil penjualan tahunan di atas 2,5 miliar rupiah sampai paling tinggi 50 miliar rupiah.

Sementara itu, beberapa klasifikasi UMKM adalah sebagai berikut:

1. *Livelihood activities* merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, contohnya pedagang kaki lima.
2. *Micro enterprise* merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small dynamic enterprise* merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak serta ekspor.

4. *Fast moving enterprise* merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang memiliki jiwa kewirausahaan dan akan transformasi menjadi usaha besar (UB).

Menurut Anoraga (2010) menyebutkan bahwa sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Sistem pembukuan yang relatif, administrasi pembukuan sederhana, dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar, terkadang pembukuan tidak di *update* sehingga sulit menilai kinerja usahanya.
2. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
3. Modal terbatas.
4. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
5. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisien jangka panjang.
6. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
7. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal paling rendah karena keterbatasan dalam administrasinya. Untuk mendapatkan dana di pasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang di antaranya:

1. Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja dapat diperhitungkan, hal tersebut diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia.

2. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru.
3. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana, dan fleksibel terhadap perubahan pasar.
4. Menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait.
5. Memiliki potensi untuk berkembang dengan berbagai upaya pembinaan dari kelemahan yang sering menjadi faktor penghambat dan permasalahan.

2.1.2.2 Karakteristik UMKM

Pentingnya peran UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menyebabkan perhatian pemerintah terhadap UMKM sangat besar. Akan tetapi tantangan persoalan yang dihadapi para pelaku UMKM tidak pernah usai. Persoalan-persoalan klasik yang seringkali dihadapi para pelaku UMKM dikelompokkan menjadi:

1. Aspek sumber daya manusia (SDM)

Pendidikan SDM sebagai sebuah investasi, hasilnya akan dinikmati oleh yang bersangkutan setelah beberapa tahun kemudian. Besar kecilnya hasil atau kemanfaatan tergantung kepada tingginya tingkat pendidikan. Tenaga kerja yang berpendidikan tinggi (sarjana-S1), dapat memiliki produktivitas yang lebih tinggi sehingga akan memiliki gaji/upah yang relatif lebih besar dari lulusan SMA ke bawah. Seseorang yang memutuskan untuk masuk dalam dunia kerja dengan ijazah SMA/K pada usia 18 tahun ia akan langsung

menerima jumlah gaji yang relatif lebih rendah. Namun jika memutuskan untuk masuk kuliah, dalam usia 18-21 tahun berarti ia akan menanggung sejumlah biaya kuliah baik bersifat langsung, maupun biaya tidak langsung termasuk kehilangan pendapatan karena kuliah. Pada usia 21 tahun setelah tamat sarjana ia masuk dalam dunia kerja dengan menerima tingkat upah/gaji yang relatif lebih tinggi dari lulusan SMA/K, akselerasi kenaikan gaji juga akan lebih cepat jika lulusan sarjana.

2. Aspek permodalan

Modal usaha UMKM membutuhkan dana yang relatif kecil, sehingga akan lebih terjangkau oleh pelaku UMKM. Kadin dan The Asia Foundation (1988) mencatat 90,36% pelaku industri rumah tangga memiliki modal sendiri, sedangkan modal pinjaman hanya 3,20%. Akan tetapi pelaku UMKM lebih memilih meminjam dari sektor non perbankan (lain-lain) sebesar 79,35%, lebih tinggi dari yang meminjam melalui Bank yaitu sekitar 18,79%. Sebenarnya suku bunga yang ditawarkan oleh non perbankan relatif lebih tinggi dari yang ditawarkan oleh pihak perbankan. Hal ini terjadi karena pelaku UMKM umumnya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan formal pengajuan kredit usaha ketika berhadapan dengan sektor perbankan.

3. Aspek manajemen

Manajemen usaha dalam UMKM bersifat tradisional. Aktivitas yang dilakukan berdasarkan kebiasaan yang bersifat turun-temurun. Pola manajemen yang diterapkan masih bersifat keluarga. Tidak ada pembagian tugas yang jelas di antara para pekerja, sehingga akibatnya pekerjaan dapat

dilakukan secara serampangan dan tumpang tindih. Tidak juga memiliki *cash flow*, sehingga tidak diketahui secara pasti apakah hasil usahanya menghasilkan untung atau rugi. Cara kerja semacam ini mematikan unsur kreativitas. Akibat dari kebiasaan ini maka tidak heran bahwa produktivitas dan nilai tambah UMKM terhadap perekonomian masih relatif rendah jika dibandingkan dengan usaha besar, meskipun jumlah pelaku dan jenis usaha UMKM melebihi dari usaha besar.

4. Aspek mentalitas (*entrepreneurship*)

Wirausaha adalah orang-orang yang selalu melakukan upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang (*opportunity*), dan perbaikan (*preparation*) hidup (Prawirokusumo, 1997). Karakter seorang wirausaha adalah memiliki semangat juang yang tinggi, pantang menyerah, kerja keras, dan selalu berinovasi. Masih rendahnya produktivitas UMKM tersebut disebabkan oleh banyak hal, di antaranya adalah rendahnya jiwa wirausaha para pelaku UMKM.

Menurut Schumpeter dalam Arsyad (1992) lima macam indikator yang dikelompokkan dalam kegiatan berinovasi adalah:

- a. Memperkenalkan produk baru yang sebelumnya tidak ada.
- b. Memperkenalkan cara/metode berproduksi baru. Metode berproduksi baru harus menjawab masalah hal efisiensi dan kualitas produk.
- c. Pembukaan pasar baru bagi produk yang dihasilkan. Pasar dapat berupa pasar lokal dan atau pasar luar negeri (ekspor). Pasar yang luas dapat menunjang meningkatkan produktivitas dan keuntungan sebagai awal

untuk terjadi penumpukkan modal dan investasi untuk pembangunan. Dua hal yang dipenuhi untuk perluasan pasar adalah efisiensi dan kualitas. Efisiensi berdampak pada rendahnya harga jual, sedangkan kualitas merujuk kepada mutu barang. Banyak barang produksi dalam negeri kalah bersaing dengan produksi luar negeri karena tidak memenuhi dua unsur ini secara bersamaan.

- d. Penemuan sumber-sumber bahan mentah baru.
- e. Perubahan organisasi industri untuk efisiensi.

5. Aspek legalitas usaha

Pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha masih cukup banyak misalnya seperti pedagang kaki lima (PKL), kios-kios, dan warung-warung. Hal ini disebabkan karena banyak hal di antaranya ketidaktahuan dan ketidakmampuan untuk mengurus izin usaha, serta karena tidak memiliki tempat usaha yang relatif permanen. Hal inilah yang dapat menjadi salah satu hambatan untuk berurusan dengan pihak perbankan. Hasil Survei Usaha Terintegrasi (2000) yang dilakukan oleh BPS menyebutkan terdapat sekitar 15 juta usaha yang tidak berbadan hukum di luar sektor pertanian, sebagian besar terdapat di sektor perdagangan (58%), menyusul sektor industri (17.35%), sektor angkutan dan komunikasi (12,38%), lembaga keuangan (10.86%), dan sektor pertambangan (1,70%).

6. Keterbatasan sarana dan prasarana

Keterbatasan kepemilikan sumber daya sarana dan prasarana, menjadi kesulitan tersendiri yang mengganggu produktivitas UMKM. Produktivitas

merupakan rasio antara *input* dengan *output*. Produktivitas tinggi jika *output* yang dihasilkan lebih besar dari *input*, tetapi jika terjadi sebaliknya berarti produktivitas UMKM yang bersangkutan rendah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Susilo dan Krisnadewara (2007) usaha kecil menengah di Yogyakarta pasca gempa berproduksi dengan fasilitas/peralatan terbatas, jumlah bahan baku terbatas, jumlah tenaga kerja terbatas, dan dengan modal finansial terbatas. Keterbatasan ini telah berdampak negatif terhadap produktivitas dan nilai tambah yang dihasilkan oleh UMKM.

2.1.2.3 Peran UMKM

Menurut Kementerian UMKM, sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tentunya memiliki kontribusi bagi ekonomi regional dan memiliki peran penting bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Tidak hanya di negara berkembang tetapi juga di negara maju UMKM memiliki lingkaran ekonomi yang aktif dan mampu *survive* dalam keadaan apapun termasuk saat pandemi Covid-19.

Sektor UMKM juga mampu menyerap sumber daya manusia paling banyak seperti pada saat ini banyak dari masyarakat yang berdiaspora dalam lingkaran UMKM dibandingkan dengan perusahaan besar (UB). UMKM juga merupakan pilar penting dalam perekonomian Indonesia, dimana jumlah UMKM yang terus meningkat dan tentunya hal ini akan berkontribusi terhadap PDRB dengan meliputi kemampuan penyerapan tenaga kerja dan investasi yang berjalan dengan lancar.

2.1.2.3 Kelebihan dan Kekurangan UMKM

UMKM memiliki beberapa potensi kelebihan dan kekurangan yang akan menjadi kunci pengembangan di masa depan, adapun kelebihan dan kekurangan UMKM di antaranya:

1. Kelebihan

- a) Memberikan kesempatan kerja bagi industri kecil untuk menyerap tenaga kerja.
- b) Keberadaan sumber wirausaha baru. Keberadaan UMKM terbukti selama ini dapat mendukung tumbuh dan berkembangnya wirausahawan baru.
- c) Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar.
- d) Memanfaatkan sumber daya alam sekitar. Sebagian besar industri kecil memanfaatkan limbah atau hasil dari industri besar atau industri lainnya.
- e) Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang diterapkan menunjukkan bahwa industri kecil dapat diperluas dan dikembangkan terhadap sektor lain yang terkait.

2. Kekurangan

Adapun yang menjadi penghambat dan permasalahan UMKM terdiri dari dua faktor yaitu:

- a) Faktor internal
 - 1) Kapasitas personel masih terbatas.
 - 2) Kendala pemasaran produk. Sebagian besar pengusaha industri kecil lebih memprioritaskan aspek produksi sedangkan fungsi-fungsi

pemasaran kurang mampu dalam mengaksesnya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar.

- 3) Konsumen cenderung tidak percaya dengan kualitas produk industri kecil.
- 4) Terkendala permodalan usaha. Sebagian besar industri kecil menggunakan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil.

b) Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah masalah yang disebabkan oleh pengembang usaha yang tidak efektif dan tidak mampu menyesuaikan situasi sosial atau sektor pasar. Misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran, tidak adanya monitoring, dan program yang tumpang tindih.

2.1.2.4 Pemberdayaan UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Prinsip pemberdayaan UMKM yaitu:

1. Menumbuhkan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
2. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
3. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM.
4. Peningkatan daya saing UMKM.

5. Penyelarasan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Menurut Sumodiningrat dalam Hapsari (2014) indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat UMKM mencakup:

1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin. Hal ini berarti semakin bertambahnya lapangan kerja dan jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor UMKM sehingga kesejahteraan penduduk meningkat.
2. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan masyarakat usaha kecil menengah melalui pendirian usaha baru dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, artinya ada kenaikan jumlah usaha terutama usaha kecil menengah yang diciptakan oleh penduduk yang menjadi target pemberdayaan. Peningkatan pendapatan berhubungan erat dengan tingkat keuntungan atau laba yang diperoleh oleh masyarakat usaha kecil menengah.
3. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
4. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan semakin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, semakin kuatnya permodalan kelompok, semakin rapinya sistem administrasi kelompok, semakin luasnya interaksi sosial dengan kelompok lain, meningkatnya kapasitas masyarakat, dan pemerataan pendapatan yang ditandai dengan peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

2.1.3 Jumlah Tenaga Kerja UMKM

Pengangguran sudah menjadi suatu hal yang sudah tidak asing lagi didengar oleh setiap orang. Tingkat pengangguran seringkali menjadi permasalahan yang cukup sulit diatasi karena banyaknya jumlah penduduk yang semakin meningkat pada setiap tahunnya. Tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat juga masih tergolong cukup tinggi. Semakin banyaknya jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota, maka akan memicu tingginya angka pengangguran yang ada pada daerah tersebut. Pengangguran merupakan angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, bahkan orang berusia 15 tahun ke atas yang masih sekolah.

Pembangunan di Provinsi Jawa Barat tidak terlepas dengan masalah pengangguran dan ketenagakerjaan. Jawa barat membutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi dan keahlian tertentu. Berbagai sektor lapangan pekerjaan dibuka setiap waktu mulai dari pertanian, perdagangan dan sektor-sektor lainnya. Jumlah angkatan kerja di Provinsi Jawa Barat yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja serta jumlah penduduk yang besar akan menghasilkan angka pengangguran yang besar pula. Akan tetapi angkatan kerja yang besar jika dapat dimanfaatkan dengan baik akan mampu meningkatkan kegiatan perekonomian yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Masalah angkatan kerja dapat teratasi apabila angkatan kerja yang tersedia terserap oleh kesempatan kerja. Kesempatan kerja merupakan keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan pekerjaan di masyarakat. Jumlah penduduk

yang besar ditambah dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk yang seharusnya menjadi pendorong peningkatan kegiatan ekonomi justru menjadi beban bagi pembangunan ekonomi. Akan tetapi tingkat pertumbuhan penduduk tinggi itu tidak diiringi oleh pertumbuhan kesempatan kerja. Perekonomian di Indonesia memiliki potensi besar dalam wujud UMKM dan usaha besar. Pengembangan UMKM yang besar dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus mendorong perekonomian daerah.

2.1.3.1 Pengertian Tenaga Kerja

Menurut Dumairy (1997) tenaga kerja adalah penduduk yang mempunyai umur di dalam batas usia kerja. Tujuan dari pemilihan batas umur tersebut supaya definisi yang diberikan dapat menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Menurut Simanjuntak, tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga.

Menurut Mulyadi (2008) tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Menurut Soepomo (1987) batasan hukum perburuhan sebagai himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.

Menurut Lewis dalam Todaro (2000) kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan masalah. Kelebihan pekerja satu sektor akan memberi andil

terhadap pertumbuhan *output* dan penyediaan pekerja di sektor lain. Terdapat dua sektor dalam perekonomian negara sedang berkembang, yaitu sektor modern dan sektor tradisional. Sektor tradisional tidak hanya berupa sektor pertanian di pedesaan, melainkan juga termasuk sektor informal di perkotaan (pedagang kaki lima, pengecer, dan pedagang angkringan).

Sektor informal mampu menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada selama berlangsungnya proses industrialisasi, sehingga disebut katup pengaman ketenagakerjaan. Dengan terserapnya kelebihan tenaga kerja di sektor industri oleh sektor informal, maka pada suatu saat tingkat upah di pedesaan akan meningkat. Peningkatan upah ini akan mengurangi perbedaan tingkat pendapatan antara pedesaan dan perkotaan, sehingga kelebihan penawaran pekerja tidak menimbulkan masalah pada pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya kelebihan pekerja justru merupakan modal untuk mengakumulasi pendapatan, dengan asumsi perpindahan tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor modern berjalan lancar dan perpindahan tersebut tidak pernah menjadi terlalu banyak.

2.1.3.2 Pengertian Pekerjaan Formal dan Informal

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pekerja informal mengacu pada orang yang bekerja tanpa relasi kerja, yang berarti tidak ada perjanjian yang mengatur elemen-elemen kerja, upah, dan kekuasaan. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara umum mendefinisikan sektor informal sebagai semua bisnis komersial dan nonkomersial yang tidak terdaftar dan yang tidak memiliki struktur organisasi formal dan secara umum memiliki ciri-ciri

dimiliki oleh keluarga, kegiatan berskala kecil, padat karya, menggunakan teknologi yang diadaptasi dan bergantung pada sumber daya lokal.

Konferensi Internasional Statistik Tenaga Kerja ke-17 mendefinisikan pekerja sektor informal sebagai karyawan dengan hubungan kerja yang tidak tercakup dalam perundang-undangan atau dalam praktiknya tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja, pajak, pendapatan, perlindungan sosial, atau hak tertentu untuk jaminan kerja tertentu seperti pemberitahuan pemecatan sebelumnya, pembayaran yang buruk, dibayar tahunan atau izin sakit, dan sebagainya (Badan Pusat Statistik, 2013). Sektor informal mempunyai ciri adanya sejumlah besar aktivitas produksi dan jasa skala kecil yang dilakukan individu atau memiliki keluarga dan menggunakan teknologi sederhana padat karya. Sektor informal cenderung beroperasi seperti perusahaan-perusahaan yang bersaing secara monopolistik yang memiliki kemudahan memasuki pasar, kapasitas berlebih, dan adanya persaingan yang menurunkan laba sampai ke tingkat harga penawaran tenaga kerja (Todaro, 2011)

Badan Pusat Statistik (2013) melakukan pendekatan khusus untuk menentukan penduduk yang bekerja di sektor formal atau informal yaitu berdasarkan status pekerjaan dalam pekerjaan utama dan jenis pekerjaan atau jabatan. Menurut statusnya, pekerja dikategorikan menjadi tujuh yaitu:

1. Berusaha sendiri
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar
3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar
4. Buruh/karyawan/pegawai

5. Pekerja bebas di pertanian
6. Pekerja bebas di non pertanian
7. Pekerja keluarga/tak dibayar.

Pada kategori 3 dan 4 umumnya mengacu pada pekerja di sektor formal, sementara kategori lainnya adalah sektor informal. Berdasarkan jenis pekerjaan utama, Badan Pusat Statistik telah menetapkan sepuluh kategori menurut tipe pekerjaannya yaitu:

1. Tenaga profesional
2. Tenaga kepemimpinan
3. Pejabat pelaksana dan tata usaha
4. Tenaga penjualan
5. Tenaga usaha jasa
6. Tenaga usaha pertanian, peternakan, kehutanan, nelayan dan pemburu
7. Tenaga produksi dan terkait
8. Tenaga operasional
9. Pekerja kasar
10. Lain-lain

2.1.3.3 Klasifikasi Tenaga Kerja

Berdasarkan kemampuan dan kualitas pekerja, maka tenaga kerja dapat dikelompokkan menjadi:

1. Tenaga kerja terdidik

Tenaga kerja terdidik adalah pekerjaan yang memerlukan pendidikan formal. Tenaga kerja ini memperoleh kemampuannya dalam suatu bidang

dengan cara belajar di perguruan tinggi atau pendidikan-pendidikan formal lainnya.

2. Tenaga kerja terampil

Tenaga kerja ini adalah tenaga kerja yang membutuhkan keahlian di bidang tertentu dengan melalui pelatihan atau pengalaman kerja. Tingkat keterampilan dalam bidang ini bisa diperoleh apabila tenaga kerja menjalani pelatihan khusus.

3. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil

Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil yaitu pekerja yang hanya mengandalkan tenaga kerja saja tanpa ada keunggulan lain.

Adapun klasifikasi tenaga kerja menurut status pekerjaannya maka dapat dibedakan menjadi:

1. Pekerja lepas atau biasa disebut dengan *freelance* adalah orang yang bekerja sendiri dan tidak berkomitmen pada suatu perusahaan.
2. Pekerja kontrak, merupakan seseorang yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian tertulis.
3. Pekerja tetap, merupakan seseorang yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

2.1.4 Investasi UMKM

2.1.4.1 Pengertian Investasi

Menurut Sukirno (2013) investasi dapat disebut sebagai istilah penanaman modal atau pembentukan modal. Investasi merupakan komponen kedua yang

menentukan tingkat pengeluaran agregat. Investasi juga dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanaman modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian dimasa yang akan datang.

Tujuan investasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu mengganti bagian dari penyediaan modal yang rusak (depresiasi) dan sebagai tambahan penyediaan modal yang ada. Sementara tujuan lainnya menyebutkan bahwa pengeluaran investasi adalah pembelian barang-barang yang memberi harapan menghasilkan keuntungan dimasa yang akan datang. Harapan keuntungan ini digunakan sebagai faktor utama dalam pengambilan keputusan investasi (Kunarjo dalam Wahyudi, 2010).

Menurut teori Harrod dan Domar investasi memberi peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya mengenai watak ganda yang dimiliki investor. Pertama, investasi memiliki peran ganda dimana dapat menciptakan pendapatan dan kedua, investasi dapat memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal (Jhingan dalam Wiranto, 2020). Menurut Sadono Sukirno (1999) pada praktiknya dalam dunia usaha untuk mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan dalam satu tahun tertentu yang digolongkan sebagai investasi meliputi pengeluaran atau pembelanjaan sebagai berikut:

- a. Pembangunan berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan.
- b. Pembelanjaan untuk membangun rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik, dan bangunan-bangunan lain.
- c. Pertumbuhan nilai struktur barang yang belum terwujud, bahan mentah, dan

barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun penghitungan pendapatan nasional.

Peranan investasi ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi dalam perekonomian antara lain (Sadono Sukirno, 2006):

- a. Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat. Sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional. Peningkatan ini akan selalu diikuti oleh pertumbuhan dalam kesempatan kerja.
- b. Pertumbuhan barang dan modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas memproduksi di masa depan dan perkembangan ini akan menstimulasi pertumbuhan produksi nasional dan kesempatan kerja.
- c. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Perkembangan ini akan memberi sumbangan penting terhadap kenaikan produktivitas dan pendapatan per kapita masyarakat.

2.1.4.2 Jenis Investasi

Adapun jenis-jenis investasi dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a. Investasi dilihat dari segi pengeluarannya (Samuelson, 1994)
 - 1) Investasi bruto, merupakan investasi yang menunjukkan tambahan-tambahan seluruh modal.
 - 2) Investasi neto, merupakan investasi hasil pengurangan antara investasi bruto dengan penyusutan.
- b. Investasi dilihat dari segi pendapatan nasional negara (Soediyono, 1995)

1) *Induced investment*

Induced investment merupakan investasi yang nilainya berubah akibat dari meningkatnya permintaan produksi yang ada. Misalnya adanya kenaikan pendapatan yang ada pada masyarakat di suatu tempat/negara menjadikan kenaikan kebutuhan barang-barang tertentu yang berarti kenaikan permintaan suatu barang (kenaikan suatu barang mendorong meningkatnya investasi).

2) *Autonomous investment*

Autonomous investment merupakan investasi yang nilainya akan berubah sebagai akibat dari adanya penemuan-penemuan barang seperti teknologi baru ataupun produk barang atau tidak dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pendapatan nasional. Adapun yang termasuk dalam investasi ini adalah rehabilitasi prasarana jalan, irigasi, dan sebagainya.

c. Investasi dilihat dari segi wujudnya (Guritno Mangkoesoebroto, 1992)

1) Investasi riil

Investasi riil merupakan investasi terhadap barang tahan lama (barang modal) yang akan digunakan dalam proses produksi, yang termasuk dalam investasi ini adalah:

- a) Investasi tetap perusahaan, yaitu investasi terdiri dari pengeluaran perusahaan-perusahaan atau mesin-mesin tahan lama serta perlengkapan mesin lainnya.
- b) Investasi untuk perumahan, yaitu investasi untuk pembangunan tempat tinggal atau perumahan.

- c) Investasi persediaan perusahaan, yaitu investasi yang terdiri dari stok modal atau barang-barang modal yang tahan lama.

2) Investasi finansial

Investasi finansial merupakan investasi terhadap surat-surat berharga seperti saham atau obligasi.

2.1.4.3 Teori Investasi

Teori Investasi Keynes berkaitan dengan apakah suatu proyek penanaman modal atau investasi layak atau tidak untuk dilakukan. Teknik untuk mengetahui apakah suatu proyek itu menguntungkan atau tidak, yaitu dengan membandingkan profitabilitas relatif proyek-proyek dengan mendiskonto hasil-hasil di masa depan. Adapun teknik-teknik mendiskonto yang dikemukakan Keynes yaitu (Endar Supriyanto, 2006):

a. Nilai Uang di Masa Depan dari Jumlah Nilai Sekarang

Tujuan utama dari seseorang yang menambahkan modalnya adalah untuk menerima jumlah uang yang lebih besar di masa yang akan datang. Hal ini berarti seseorang yang memutuskan meminjamkan uangnya dengan harapan untuk memperoleh keuntungan. Apabila uang tidak diinvestasikan lebih dari satu tahun, maka bunga yang diperoleh adalah bunga majemuk atau *compounding of interest*, yaitu bunga yang ditanamkan atas bunga. Rumus untuk nilai di masa depan dari sejumlah nilai sekarang adalah sebagai berikut (Soediyono, 1992):

$$C = P(1 + 1/m)^n$$

Dimana:

C = Nilai masa depan dari sejumlah nilai sekarang

P = Jumlah pokok pada tahun pertama

I = Tingkat bunga tahunan

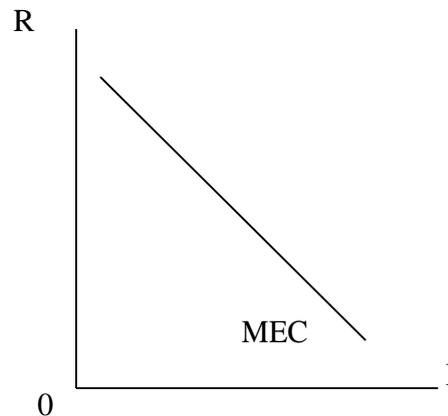
m = Berapa kali bunga ditawarkan dalam satu tahun

n = Jumlah periode dimana bunga diterima

Berdasarkan rumus tersebut dapat disimpulkan jika bunga mengalami kenaikan maka nilai C juga akan naik, sedangkan jika tingkat bunga nol berarti tidak ada manfaat di masa depan dari dana yang diinvestasikan. Nilai di masa depan dari sejumlah nilai sekarang dapat diketahui dengan menggunakan tabel *compounding factor*.

b. *Marginal Efficiency of Capital (MEC)*

Suatu usulan investasi dapat dinilai dengan tingkat diskonto yang mempersamakan pengeluaran tunai sekarang dengan nilai sekarang dari penerimaan tunai masa depan. Hal ini dikarenakan suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu usulan investasi untuk dipertimbangkan maka skedul MEC dapat dibuat, dimana biasanya usulan-usulan investasi disusun secara berurutan berdasarkan tingkat hasil dari hasil yang terbesar ke hasil yang terkecil. Skedul MEC mempunyai kemiringan yang negatif, karena usulan-usulan investasi disusun dari urutan tingkat hasil yang diharapkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Adapun skedul MEC dapat digambarkan sebagai berikut (Endar Supriyanto, 2006):



Gambar 2.1 Kurva *Marginal Efficiency of Capital*

Sumber: researchget.net

Dimana: R = Tingkat keuntungan

I = Banyaknya investasi

MEC = *Marginal efficiency of capital*

c. Perubahan-perubahan MEC

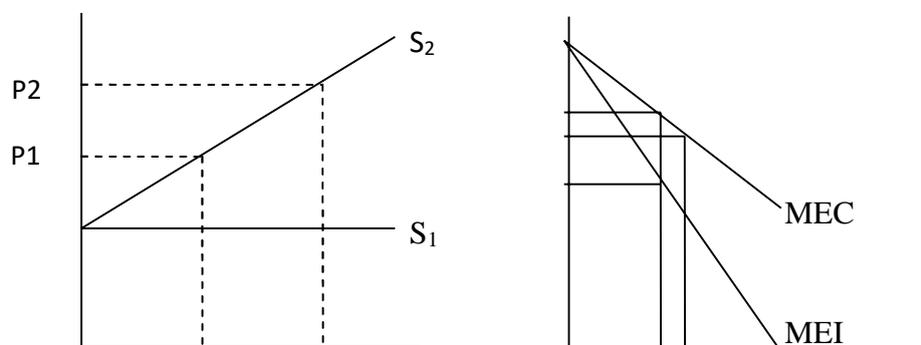
Menurut Endar Supriyanto (2006) MEC dapat berubah karena ada beberapa faktor yaitu antara lain:

- 1) Biaya aktiva sekarang.
- 2) Jumlah dana yang dihasilkan selama umur aktiva yang dapat digunakan.
- 3) Distribusi jumlah dana-dana yang dihasilkan kurva MEC naik jika biaya aktiva naik, maka jumlah dana yang dihasilkan kurva MEC berlereng negatif jika biaya aktiva naik.

Jumlah dana-dana yang dihasilkan terpusat sepanjang periode bekerjanya aktiva tersebut. Faktor-faktor yang menentukan bentuk kurva MEC dipengaruhi oleh tindakan permintaan, kekuatan-kekuatan pasar, dan pengharapan-pengharapan.

d. *Marginal Efficiency of Investment (MEI)*

Pada skedul *marginal efficiency of capital* terdapat asumsi bahwa industri barang modal mampu menawarkan peralatan dalam jumlah yang tidak terbatas pada biaya rata-rata yang konstan. Akan tetapi sangat mungkin bahwa rata-rata biaya barang modal baru akan naik akibat peningkatan penggunaan fasilitas produksi, maka MEC dari seluruh usulan investasi akan turun dan MEC akan menjadi lebih curam dari biaya penawaran barang modal baru dalam keadaan konstan. Pengaruh dari suatu kenaikan biaya penawaran terhadap tingkat hasil yang diharapkan dari usulan investasi dinamakan *marginal efficiency of investment* yang dapat digambarkan sebagai berikut (Endar Supriyanto, 2006):



Gambar 2.2 Kurva *Marginal Efficiency of Investment*

Sumber: researchget.net

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang sebelumnya telah dilakukan dan mempunyai hubungan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengenai Analisis Kontribusi Usaha Kecil dan Menengah terhadap Produk Domestik Regional Bruto se-Priangan Timur 2015-

2020. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian dan Penulis	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Analisis Kontribusi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Azzahrani Giri Saputri (2014)	- Jumlah tenaga kerja - Investasi UMKM	- Ekspor UMKM	1) Penyerapan Tenaga Kerja UKM berpengaruh negatif. 2) Ekspor UKM tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB 3) Investasi UKM berpengaruh terhadap PDRB 4) Secara bersama (penyerapan tenaga kerja UMKM, UMKM Ekspor, dan Investasi pada UMKM) berpengaruh signifikan terhadap PDRB.
2.	Analisis Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap PDRB. (Nichlatul Laily, 2016)	- Jumlah UMKM - Jumlah tenaga kerja	- <i>Output</i> industri	1) Perkembangan Usaha Kecil Menengah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB.
3.	Analisis Pengaruh Jumlah UMKM, Jumlah Tenaga Kerja UMKM, Ekspor UMKM dan Investasi UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Mahardea Puspa Senja, 2016)	- Jumlah UMKM - Jumlah tenaga kerja UMKM - Nilai investasi UMKM	- Nilai ekspor UMKM	1) Jumlah unit UMKM dan nilai investasi UMKM mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia 2) Tenaga kerja UMKM dan nilai ekspor UMKM tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia
4.	Pengaruh Jumlah UMKM dan Jumlah Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar (Riska, 2020)	- Jumlah UMKM - Jumlah tenaga kerja UMKM	- Pertumbuhan ekonomi	3) Jumlah UMKM dan jumlah tenaga kerja UMKM mempunyai pengaruh yang signifikan.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	Analisis Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 1997-2017 (Rosyid Nur Rohman, 2019)	- Jumlah tenaga kerja UMKM - Jumlah UMKM - Investasi UMKM	- PDB UKM - Ekspor UMKM	1) Jumlah tenaga kerja UMKM, ekspor UMKM, dan investasi UMKM berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
6.	Analisis Pengaruh Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap PDRB di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 1997-2017. (Assyfa Astari, 2017)	- Jumlah UMKM - Jumlah tenaga kerja UMKM	- Kredit UMKM - IPM	1) Tenaga kerja UMKM dan Kredit UMKM berpengaruh signifikan terhadap PDRB. 2) Jumlah UMKM dan IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB
7.	Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gowa. (Panji Ihza Panutan, 2021)	- Jumlah tenaga kerja UMKM - Jumlah unit UMKM - Investasi UMKM	Tidak terdapat perbedaan variabel.	1) Jumlah unit UMKM, dan investasi UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UMKM di kabupaten Gowa. 2) Tenaga kerja UMKM tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Gowa
8.	Pengaruh Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi di Pemerintah Kota Batu) (Pradnya Paramita Hapsari., dkk, 2014)	- Jumlah UMKM - Jumlah tenaga kerja UMKM	- Modal UMKM - Laba UMKM	1) Jumlah UKM dan tenaga kerja UKM tidak ditemukan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Batu 2) Modal UKM dan Laba UKM ditemukan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan Ekonomi di Kota Batu.
9.	Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja dan Jumlah Unit Usaha Kecil Menengah (Ukm) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar. (Nurul Fajrin, 2018)	- Jumlah tenaga kerja UMKM - Jumlah unit UMKM	- Tidak terdapat perbedaan variabel.	1) Jumlah tenaga kerja UKM terhadap pertumbuhan PDB di kota Makassar berpengaruh positif dan signifikan. 3) Jumlah unit UKM terhadap pertumbuhan PDB di kota Makassar berpengaruh positif dan signifikan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	Analisis Pengaruh Jumlah UMKM, dan Jumlah Tenaga Kerja Umkm terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Tahun 2014-2019 Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kabupaten Lampung Tengah) (Deni Indrawan, 2021)	- Jumlah unit UMKM - Jumlah tenaga kerja UMKM	Tidak terdapat perbedaan variabel.	1) Jumlah UMKM tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 2) Jumlah Tenaga kerja UMKM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.2 Kerangka Pemikiran

Jumlah UMKM, jumlah tenaga kerja UMKM, dan investasi UMKM merupakan beberapa yang turut mempengaruhi kontribusi PDRB. Adapun hubungan ketiga faktor tersebut dengan PDRB adalah sebagai berikut:

2.2.1 Hubungan Jumlah UMKM dengan PDRB

Pada analisis ekonomi makro pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita. Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan bahwa perekonomian telah berkembang dan mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. Tingkat pertumbuhan PDRB dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Tingkat pertumbuhan PDRB dan tingkat produksi diturunkan dari fungsi produksi barang dan jasa. Menurut fungsi produksi Mankiw UMKM merupakan penyebab utama pekerjaan dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun pertumbuhan ekonomi (PDRB) dipengaruhi oleh banyak faktor (Audretsch, Thurik, Verheul, & Wennekers, 2002 dalam penelitian Aristeidis G. Samitasa, Dimitris F. Kenourgiosb, 2005).

2.2.2 Hubungan Tenaga Kerja UMKM dengan PDRB

Menurut Todaro (2000) pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran domestiknya lebih besar. Meski demikian hal tersebut masih dipertanyakan apakah laju pertumbuhan yang cepat benar-benar akan memberikan dampak positif atau negatif dari pembangunan ekonominya.

Pengaruh positif atau negatif dari pertumbuhan penduduk tergantung pada kemampuan sistem perekonomian daerah tersebut dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan pertambahan tenaga kerja tersebut. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh tingkat dan jenis akumulasi modal serta tersedianya input dan faktor penunjang seperti kecakapan manajerial dan administrasi. Melalui model sederhana tentang pertumbuhan ekonomi, pada umumnya tenaga kerja diartikan sebagai angkatan kerja yang bersifat homogen. Menurut Lewis dalam Meidona (2021), angkatan kerja yang homogen dan tidak terampil dianggap bisa bergerak serta beralih dari sektor tradisional ke sektor modern secara lancar dan dalam jumlah terbatas. Pada keadaan tersebut penawaran tenaga kerja dari sektor tradisional bersumber pada ekspansi kegiatan sektor modern.

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja. Menurut Wilson Nicholson (1991) satu fungsi produksi suatu barang dan jasa tertentu (q) adalah $q = f(K, L)$ dimana K merupakan modal dan L adalah tenaga kerja yang memperlihatkan jumlah maksimal suatu barang atau jasa yang

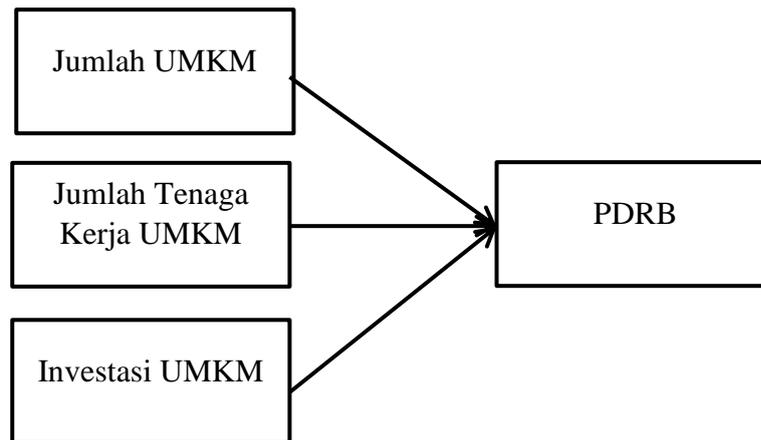
dapat diproduksi dengan menggunakan kombinasi alternatif antara K dan L. Maka apabila salah satu masukan ditambah satu unit tambahan dan masukan lainnya dianggap tetap akan menyebabkan tambahan keluaran yang dapat di produksi. Tambahan pengeluaran yang dapat diproduksi inilah yang disebut dengan produk fisik marjinal (*marginal physical product*).

2.2.3 Hubungan Investasi UMKM dengan PDRB

Pada skala makro investasi didefinisikan sebagai pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Dengan kata lain dalam teori ekonomi, investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian. Investasi baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) memainkan peranan penting dalam menentukan jumlah *output* dan pendapatan. Semakin besarnya investasi baik PMDN maupun PMA maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumber daya yang ada di suatu daerah. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan semakin meningkatnya PDRB dan diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkat. Dengan demikian investasi PMDN dan PMA memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Semakin besarnya investasi pemerintah pada barang publik maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan

sumber daya yang dimiliki suatu daerah. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan semakin meningkatnya PDRB.

Berdasarkan pernyataan di atas, untuk lebih jelasnya mengenai kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga secara parsial jumlah UMKM, tenaga kerja UMKM, dan investasi UMKM berpengaruh positif terhadap PDRB tahun 2015-2020.
2. Diduga secara bersama-sama jumlah UMKM, tenaga kerja UMKM, dan investasi UMKM berpengaruh terhadap kontribusi PDRB tahun 2015-2020.